

ANALISA EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

Thianka Salsabila Ayu Prasyah¹, Binti Shofiatul Jannah²

^{1,2} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Korespondensi: thiankasalsabila@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the level of effectiveness of the direct expenditure budget of the East Java Province Bina Marga Public Works Office in 2021-2023. The results of the analysis show that the level of effectiveness reached 100%, reflecting the use of a very effective budget and optimal performance in financial management. However, an evaluation of budget efficiency cannot be carried out due to the absence of indirect expenditure budget data in the Annual Performance Report (LKj). This highlights the importance of improving transparency and accuracy in budget reporting to support more thorough performance evaluation in the future

Keywords: budget effectiveness; budget efficiency; financial reporting; transparency; performance evaluation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas mencapai 100%, mencerminkan penggunaan anggaran yang sangat efektif dan kinerja yang optimal dalam pengelolaan keuangan. Namun, evaluasi terhadap efisiensi anggaran tidak dapat dilakukan karena tidak adanya data anggaran belanja tidak langsung pada Laporan Kinerja Tahunan (LKj). Hal ini menyoroti pentingnya peningkatan transparansi dan akurasi dalam pelaporan anggaran untuk mendukung evaluasi kinerja yang lebih menyeluruh di masa yang akan datang.

kata kunci: efektivitas anggaran; efisiensi anggaran; pelaporan keuangan; transparansi; evaluasi kinerja

Article history

Received: desember 2024

Reviewed: desember 2024

Published: desember 2024

Plagirism checker no 79

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under

a [creative commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[attribution-noncommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran yang efektif merupakan salah satu kunci utama dalam mencapai keberhasilan program dan kegiatan di sektor publik. Di Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga memiliki tanggung jawab besar dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan. Di Provinsi Jawa Timur, yang memiliki wilayah luas dan populasi besar, kualitas infrastruktur jalan memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas, aksesibilitas, dan perekonomian daerah. Untuk itu, efektivitas anggaran belanja di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur menjadi aspek yang penting untuk dianalisis.

Anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mencakup berbagai pos, seperti pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan serta jembatan. Alokasi anggaran ini harus dikelola dengan baik agar tujuan pembangunan infrastruktur tercapai sesuai rencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan dalam pengelolaan anggaran sering kali muncul, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan dana. Selain itu, adanya potensi pemborosan atau penggunaan anggaran yang kurang optimal dapat mempengaruhi kualitas infrastruktur yang dihasilkan.

Analisis efektivitas anggaran belanja bertujuan untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran dapat mencapai tujuan yang diharapkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas hasil yang diperoleh. Dengan analisis ini, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat mengevaluasi apakah anggaran yang dialokasikan telah dikelola dengan efisien dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hasil analisis juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran di masa mendatang. Dalam konteks Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, efektivitas anggaran belanja tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran terhadap rencana, tetapi juga bagaimana pengeluaran tersebut mampu menciptakan infrastruktur berkualitas, memperbaiki kondisi jalan yang rusak, serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, serta memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pencapaian efektivitas tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan anggaran di sektor infrastruktur, khususnya pada dinas yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Timur.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS Definisi Pembangunan

Teori Pembangunan adalah teori yang membahas berbagai isu terkait pembangunan, yang mencakup pertumbuhan dan perubahan terencana dalam masyarakat, wilayah, atau negara, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan manusia.

Pembangunan didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, seperti jalan dan jembatan, yang mendukung kelancaran mobilitas, aksesibilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks pengelolaan anggaran, pembangunan merujuk pada implementasi kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik guna menciptakan fasilitas yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pembangunan mungkin juga dipahami sebagai transformasi yang mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik.

Konsep Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bertujuan untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas manusia, sekaligus membentuk struktur ruang wilayah (Renstra Kementerian PU 2010-2024, 2010). Dengan demikian, pembangunan infrastruktur memiliki dua sisi utama, yakni tujuan pembangunan dan dampaknya. Jalan dipandang sebagai komponen vital untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur jalan yang memadai dapat mempercepat arus distribusi barang dan jasa, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi baik di tingkat regional maupun nasional.

Namun, setiap proyek pembangunan juga membawa dampak terhadap lingkungan, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan pembangunan dilakukan secara optimal untuk memaksimalkan manfaat dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Konsep pembangunan jalan ini berfokus pada kebutuhan masyarakat dan prioritas daerah. Perencanaan jalan diarahkan untuk melayani wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi atau membutuhkan aksesibilitas lebih baik. Menurut Adji Adisasmita (2011:79), jalan merupakan sarana transportasi darat yang mencakup bagian jalan, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang dirancang untuk lalu lintas, baik di atas permukaan tanah, di bawah tanah atau air, maupun di atas air.

Selain itu, pembangunan jalan juga dipandang dari perspektif keberlanjutan, yang menekankan pentingnya infrastruktur yang tahan lama, ramah lingkungan, dan mudah dirawat agar dapat mendukung kebutuhan generasi mendatang.

Pemeliharaan Jalan

Pemeliharaan jalan bertujuan untuk menjaga kondisi jalan tetap dalam keadaan baik, sesuai dengan tingkat pelayanan dan kapasitasnya, sejak selesai dibangun hingga mencapai usia rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan pemeliharaan mencakup upaya untuk memastikan jalan berfungsi secara optimal sesuai perannya, termasuk perbaikan ringan, pengendalian kerusakan, dan pencegahan penurunan kualitas. Pemeliharaan juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki suatu aset hingga mencapai kondisi yang layak digunakan.

Anggaran Terbatas: Sering kali anggaran untuk pemeliharaan jalan tidak memadai, sehingga banyak jalan yang rusak tidak dapat segera diperbaiki. Kondisi Alam: Faktor cuaca ekstrem, seperti hujan lebat, sering kali mempercepat kerusakan jalan. Koordinasi Antarlembaga: Pemeliharaan jalan membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak swasta. Menggunakan teknologi pemantauan kondisi jalan berbasis GIS atau aplikasi modern lainnya untuk mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan secara lebih akurat. Meningkatkan kapasitas teknis dan sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan. Melibatkan masyarakat dalam pelaporan kerusakan jalan melalui platform digital.

Pemeliharaan Rutin: Kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, seperti perbaikan lubang kecil (potholes), pembersihan drainase, atau pengecatan marka jalan. Pemeliharaan Berkala: Dilakukan dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk memperbaiki kerusakan yang lebih besar, seperti overlay atau penggantian lapisan permukaan jalan. Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Pemeliharaan berskala besar untuk jalan yang mengalami kerusakan berat sehingga memerlukan penggantian struktur. Efisiensi dalam alokasi anggaran pemeliharaan menjadi kunci dalam memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara

optimal. Perencanaan anggaran pemeliharaan biasanya didasarkan pada survei kondisi jalan (*road condition survey*) dan prioritas perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan.

Anggaran Pemeliharaan Jalan

Dalam pembahasan ini, penulis akan mengulas anggaran yang digunakan untuk pemeliharaan jalan. Sebelum itu, penting untuk memahami definisi anggaran. Menurut Munandar (2011), anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis, mencakup seluruh aktivitas perusahaan, dan dinyatakan dalam satuan moneter yang berlaku untuk periode tertentu.

Dalam konteks negara sebagai sebuah organisasi, sistem penganggaran berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya berupa barang dan jasa kepada masyarakat. Seiring perkembangan sistem administrasi publik dan tuntutan masyarakat dalam kerangka sosial dan politik tertentu, muncul sistem penganggaran negara, atau yang dikenal juga sebagai penganggaran sektor publik (Abdul Halim dan Kusufi, 2012, dalam kutipan Bastian, 2006).

Anggaran harus disusun secara efisien dan efektif, yaitu dengan memanfaatkan alokasi dana yang tersedia secara optimal, berdasarkan prinsip efisiensi, ketepatan sasaran, dan ketepatan waktu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Konsep Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu aspek penting dalam konsep *value for money*. Efisiensi dinilai berdasarkan rasio antara output dan input; semakin besar output dibandingkan input, semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo, 2009 dalam Abdul Halim, 2012). Ukuran efisiensi ini mengacu pada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output (*cost of output*). Mahmudi (2007 dalam Abdul Halim, 2012) menyatakan bahwa efisiensi mengukur sejauh mana organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan output.

Konsep ini juga menyoroti pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran dalam pembangunan jalan. Pembangunan harus dilakukan dengan meminimalkan pemborosan sumber daya dan memastikan bahwa setiap dana yang digunakan memberikan hasil yang maksimal. Dalam konteks kinerja *value for money*, efisiensi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi teknis (manajerial). Efisiensi alokasi berkaitan dengan kemampuan menggunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal, sedangkan efisiensi teknis mencakup kemampuan memanfaatkan input secara efektif untuk menghasilkan output tertentu.

Konsep Efektifitas

Efektifitas merupakan indikator keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi dianggap efektif jika berhasil mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektifitas dilakukan dengan menilai hasil akhir suatu pelayanan dalam kaitannya dengan output yang dihasilkan.

Menurut Bungkaes (2013), efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan, yang berarti sejauh mana output, kebijakan, dan prosedur organisasi mampu mencapai tujuan yang telah dirancang. Dalam konteks ini, efektifitas melibatkan pemanfaatan sumber daya, seperti tenaga kerja, material, dan anggaran, secara optimal untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan program.

Efektifitas juga mengacu pada kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat, serta keselarasan

dengan prioritas pembangunan daerah. Meskipun tidak ada definisi universal tentang efektivitas, konsep ini umumnya berkaitan dengan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan secara optimal.

Efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh pelaksanaan anggaran belanja mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam program pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan atau pemeliharaan jalan dan jembatan. Indikator utama biasanya mencakup realisasi fisik proyek dibandingkan dengan rencana awal. Efektivitas tidak hanya dilihat dari penyelesaian proyek, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Misalnya, apakah infrastruktur yang dibangun mampu meningkatkan mobilitas, mengurangi waktu perjalanan, atau mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pengukuran Kinerja

Kinerja dalam konteks ini merujuk pada hasil yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam melaksanakan program atau proyek pembangunan infrastruktur jalan, dengan mengacu pada indikator efektivitas dan efisiensi anggaran. Ketersediaan Anggaran: Kinerja dapat terganggu jika ada kendala dalam pendanaan, seperti keterlambatan pencairan anggaran. Sumber Daya Manusia: Kapasitas dan kompetensi tim pelaksana memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Kondisi Eksternal: Faktor seperti cuaca, regulasi, atau gangguan sosial dapat memengaruhi pencapaian target.

Untuk mengukur suatu keberhasilan pembangunan Negara apabila proses dari suatu sistem yang melibatkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme, dilaksanakan dengan seksama sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku. Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi untuk memantau realisasi anggaran dan proyek secara real-time. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Meningkatkan transparansi melalui laporan kinerja yang terbuka untuk publik. Dengan adanya ukuran sebagai bahan evaluasi dapat diukur seberapa jauh kemajuan atau kegagalan dalam tatanan pembangunan sebagai media pengukur kesuksesan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan perlu juga diperhatikan untuk mengukur atau menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan. harus dimulai dari tingkat pemahaman semua komponen terkait indikator-indikator/variabel-variabel pembangunan serta pengertian penerapan kebijakan dan hasil dari proses pelaksanaan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan deskriptif, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik serta menggambarkan karakteristik suatu fenomena atau populasi secara sistematis. Penelitian kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengukur variabel-variabel tertentu dan menarik kesimpulan berdasarkan statistik, sementara pendekatan deskriptif memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi atau situasi yang sedang diteliti, tanpa berusaha untuk mengubah atau memanipulasi variabel tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena yang diteliti serta membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Jl. Gayung Kebonsari No.167, Surabaya. Waktu pelaksanaan penelitian adalah

pada bulan Juni 2024. Fokus penelitian ini diarahkan pada penggunaan anggaran belanja di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengakses dan menganalisis laporan LKJ tahun 2021-2023 yang tersedia di situs web resmi binamarga.jatimprov.go.id.

Metode Analisis Data

Menurut Halim Abdul (2008), seperti yang dikutip oleh Imanuel Pangkey et al.

(2015), analisis tingkat efektivitas realisasi belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan kemampuan pemerintah provinsi dalam melaksanakan anggaran belanja yang telah direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan tersebut.

Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Target anggaran belanja langsung}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas dihitung menggunakan rumus tertentu yang dalam penelitian ini diterapkan untuk periode 2021-2023. Perhitungan potensi anggaran belanja dilakukan dengan mengalikan total anggaran belanja dengan tarif anggaran belanja, sehingga diperoleh jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, Halim Abdul (2008) juga menjelaskan analisis tingkat efisiensi dalam realisasi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Rasio efisiensi mencerminkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk mencapai pengeluaran tertentu dengan realisasi anggaran belanja yang diperoleh. Pengukuran efisiensi dilakukan menggunakan rumus khusus untuk menganalisis rasio tersebut.

Rumus pengukuran efisiensi adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Target anggaran belanja tidak langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja tidak langsung}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Realisasi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam dilihat dalam tabel 1

Tabel 1

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Tahun anggaran	Target anggaran	Realisasi anggaran
2021	1.521.525.320.816	1.460.572.951.568
2022	1.292.563.298.578	1.219.221.052.543
2023	1.128.356.452.648	1.043.515.875.542

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Analisis Dan Perhitungan Efektivitas

Halim Abdul (2008), seperti dikutip oleh Imanuel Pangkey et al. (2015), membahas analisis tingkat efektivitas realisasi belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Rasio efektivitas menunjukkan sejauh mana pemerintah provinsi mampu merealisasikan anggaran belanja yang telah direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Tingkat efektivitas ini dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran yang telah direncanakan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Target anggaran belanja langsung}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

- Hasil perbandingan tingkat pencapaian di atas 100% menunjukkan sangat efektif.
- Hasil perbandingan tingkat pencapaian antara 99% hingga 91% menunjukkan efektif.
- Hasil perbandingan tingkat pencapaian di bawah 90% menunjukkan tidak efektif.

Tabel 2

Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Tahun anggaran	Target anggaran	Realisasi anggaran belanja	Persentase (%)	kriteria
2021	1.521.525.320.816	1.460.572.951.568	100%	Sangat efektif
2022	1.292.563.298.578	1.219.221.052.543	100%	Sangat efektif
2023	1.128.356.452.648	1.043.515.875.542	100%	Sangat efektif

Bisa dilihat pada Tabel 2, tingkat efektivitas anggaran belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021-2023 menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 100%, yang berarti sangat efektif. Hal ini mencerminkan bahwa penggunaan anggaran tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan dengan optimal, menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan sumber daya keuangan di instansi tersebut.

Analisis Dan Perhitungan Efisiensi

Pengukuran efisiensi anggaran belanja dilakukan dengan membagi biaya pengeluaran anggaran belanja tidak langsung dengan total realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung.

Tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dihitung dengan membandingkan total anggaran belanja langsung dan tidak langsung serta realisasi anggaran belanja. Pengukuran efisiensi memiliki kriteria sebagai berikut:

- Jika hasilnya < 20%, maka sangat efisien.
- Jika hasilnya antara 21% hingga 85%, maka efisien.
- Jika hasilnya > 85%, maka tidak efisien.

Rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Target anggaran belanja tidak langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja tidak langsung}} \times 100\%$$

Dalam efisiensi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, penulis mencatat bahwa rumus realisasi anggaran belanja tidak langsung dan target tidak dapat diterapkan karena tidak ditemukan adanya anggaran belanja tidak langsung dalam Laporan Kinerja Tahunan (LKj). Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk menghitung efisiensi anggaran pada dinas tersebut, sehingga menimbulkan tantangan dalam menganalisis kinerja pengelolaan anggaran secara menyeluruh.

Pembahasan Penelitian Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Hasil perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021-2023 menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 100%, yang berarti sangat efektif. Hal ini mencerminkan bahwa penggunaan anggaran tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan dengan optimal, menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan sumber daya keuangan di instansi tersebut.

Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Dalam efisiensi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, penulis mencatat bahwa rumus realisasi anggaran belanja tidak langsung dan target tidak dapat diterapkan karena tidak ditemukan adanya anggaran belanja tidak langsung dalam Laporan Kinerja Tahunan (LKj). Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk menghitung efisiensi anggaran pada dinas tersebut, sehingga menimbulkan tantangan dalam menganalisis kinerja pengelolaan anggaran secara menyeluruh. Ketiadaan data mengenai belanja tidak langsung ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan akurasi dalam pelaporan anggaran untuk mendukung evaluasi yang lebih efektif di masa mendatang.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Tingkat efektivitas anggaran belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021-2023 mencapai 100%, menunjukkan penggunaan anggaran yang sangat efektif dan kinerja optimal dalam pengelolaan keuangan. Namun, analisis efisiensi anggaran tidak dapat dilakukan karena laporan kinerja tahunan (LKj) tidak mencantumkan data anggaran belanja tidak langsung. Ketiadaan data ini mengindikasikan perlunya peningkatan transparansi dan akurasi pelaporan anggaran untuk mendukung evaluasi kinerja yang lebih komprehensif di masa depan

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, yaitu:

1. Peningkatan Perencanaan Anggaran

- Melakukan perencanaan anggaran yang lebih terukur dan berbasis data. Penggunaan metode forecasting berbasis kebutuhan prioritas dapat membantu mengalokasikan anggaran secara lebih efisien.

- Memperhatikan time frame proyek agar tidak ada keterlambatan yang memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran.
- 2. Evaluasi Pelaksanaan Program**
 - Melakukan evaluasi berkala terhadap program dan proyek untuk memastikan pencapaian target sesuai rencana. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap pelaksanaan proyek serta capaian indikator kinerja.
 - Menggunakan indikator efektivitas dan efisiensi yang jelas untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan anggaran.
 - 3. Optimalisasi Sumber Daya**
 - Mengurangi pemborosan sumber daya dengan memilih teknologi konstruksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
 - Memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai.
 - 4. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**
 - Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, misalnya dengan melibatkan pengawasan independen dan masyarakat untuk memantau pelaksanaan program.
 - Memastikan laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan tersedia secara terbuka.
 - 5. Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan**
 - Menggalang kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk mendukung pendanaan tambahan atau membantu pelaksanaan proyek yang lebih baik.
 - Melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan untuk memastikan program prioritas sesuai kebutuhan warga.
 - 6. Pengelolaan Risiko**
 - Mengidentifikasi potensi risiko dalam pelaksanaan proyek, baik dari sisi teknis maupun non-teknis, untuk mengurangi pemborosan anggaran.
 - Menyusun strategi mitigasi risiko yang komprehensif agar target tetap tercapai meski ada hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armono, D., & Widiyaningsih, N. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 20(1), 323-331.
- Dwifarchan, R. M. R., & Sulistiyanti, U. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 23-33.
- Lona, S. S., Perseveranda, M. E., & Manafe, H. A. (2023). Analisis Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 879-889.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sekto Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahmayani, M. W., & Kurnadi, E. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi pada Seluruh Desa di Kecamatan Kadipaten). *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 703-713.
- Rusmita, S. (2016). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(3), 237.

- Susanti, A., Riadi, S., & Sari, D. (2021). Analisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)*, 5(3), 153-162.
- Widiyaningsih, V. A., & Prihatiningsih, M. (2021, December). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2017-2019. In *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS* (Vol. 4, No. 1, pp. 054-067).
- Yuliyanto, W., Khasanah, U., & Umami, R. (2022). Analisis efisiensi dan efektivitas anggaran APBD terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten ABC periode 2018-2020. *Jurnal E-Bis*, 6(2), 456-468.
- Yustika, Y., Kirmizi, K., & Silfi, A. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Operating Capacity Dan Biaya Agensi Manajerial Terhadap Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Zhafiri, R. G., & Trisnaningsih, S. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2436-2445.